

KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

LOCAL GOVERNMENT CAPACITY IN EMPOWERING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DURING COVID-19 PANDEMIC

Irma Purnamasari^{1*}, Denny Hernawan², Sri Hastuti³

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor, Jawa Barat 16720

³Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Profesi Indonesia (LP3I), Gedung Sentra Kramat, Jl. Kramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat
10450

*Korespondensi: Irma Purnamasari. Email: irma.purnamasari@unida.ac.id

(Diterima: 20-10-2021; Ditelaah: 02-11-2021; Disetujui: 13-11-2021)

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to expand employment opportunities and can play a role to improve equity and income of people. Therefore, the development of MSMEs still faces various constraints that need attention from various parties, especially the government, both central and local one. This research aims to find out the capacity of local government in empowering MSMEs during COVID-19 pandemic in Sukabumi City. The capacity of local government is based on three levels, namely system level, organizational/institutional level, and individual/human resource level. Method of this research is descriptive-qualitative method by maximizing primary and secondary data. Collection of primary data uses interview and observation, meanwhile secondary data are collected by documentation. The collected data are qualitatively described. Results of this research indicate that the capacity of local government based on system level, organizational/institutional level, and individual/human resource level is needed in empowering MSMEs during COVID-19 pandemic in Sukabumi City. The capacity building of local government of Sukabumi City has been conducted but it is not optimal yet and therefore the capacity building of local government is needed to improve the contribution of MSMEs on the local economy.

Key words: COVID-19 Pandemic, Empowerment, Local Government Capacity, Micro, Small and Medium Enterprises.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan untuk meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, UMKM dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi. Kapasitas pemerintah daerah didasarkan pada tiga level, yaitu level sistem, level organisasi/kelembagaan, dan level individu SDM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan memaksimalkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah diperlukan dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi. Kapasitas pemerintah daerah dimaksud di dasarkan pada level sistem, level organisasi/kelembagaan, dan level individu SDM. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kota Sukabumi sudah dilaksanakan namun belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang UMKM untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

Kata kunci: Kapasitas Pemerintah Daerah, Pandemi COVID-19, Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PENDAHULUAN

Salah satu yang terkena dampak pandemi *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) ialah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menggambarkan bahwa 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Sektor UMKM yang paling terdampak adalah makanan dan minuman. Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19, selain makanan dan minuman, adalah industri kreatif dan pertanian (Amri, 2020: 125).

Meskipun pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain juga ada kesempatan yang muncul. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US\$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200% (Amri, 2020: 125-126).

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian, seperti yang dituangkan dalam strategi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJMN 2014-2019, pemerintah menekankan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar menjadi usaha berkelanjutan dan berskala besar. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan

UMKM (Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, 2021).

Namun berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM agar dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Upaya tersebut memerlukan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19.

MATERI DAN METODE

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengembangan UMKM memerlukan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui pemberdayaan (*empowerment*) UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 8).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1). Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1)].

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 2). Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2)].

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 2). Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (3)].

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berke-

adilan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 5).

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pengembangan UMKM memerlukan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) salah satunya dari sisi pemerintah daerah.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berarti upaya menyesuaikan, mereformasi, dan memodifikasi semua kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme kerja, koordinasi; meningkatkan keterampilan dan kualifikasi aparatur pemerintah daerah; dan merubah sistem nilai dan sikap yang dijadikan acuan aparatur pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ilato, 2017: 39).

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) pemerintah daerah menurut Grindle (1997) dan UNDP (1999) bermuara pada tiga level intervensi, yakni: (1) level sistem, (2) level organisasi/kelembagaan, dan (3) level individu/aparatur (Ilato, 2017: 3). Tiga level intervensi peningkatan kapasitas pemerintah daerah tersebut (Ilato, 2017: 40) adalah sebagai berikut:

1. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.
2. Level organisasi/kelembagaan, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan

organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.

3. Level individu/aparatur, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu/aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja agar berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Soeprapto (2007), peningkatan kapasitas pemerintah daerah dipengaruhi oleh setidaknya lima faktor signifikan, yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Ilato, 2017: 52-54). Lima faktor signifikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama, berkaitan dengan *collective commitments* dari seluruh aktor yang terlibat dalam organisasi/kelembagaan pemerintahan daerah. Faktor kepemimpinan sangat menentukan sejauhmana peningkatan kapasitas pemerintah daerah dapat dilaksanakan atau disukseskan.
2. Kepemimpinan, berhubungan dengan *conducive leadership* yang menjadi salah satu hal paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program peningkatan kapasitas personal dalam organisasi/kelembagaan pemerintahan daerah.
3. Reformasi peraturan, menyangkut pembaharuan terhadap kontekstualitas politik pemerintahan daerah, budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlandung pada peraturan yang ada, dan faktor legal-formal-prosedural lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan dan kesuksesan program peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
4. Reformasi kelembagaan, mengacu pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi peningkatan kapasitas

personal dan organisasi/kelembagaan pemerintahan daerah. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting dan kondusif, yaitu struktural dan kultural, dalam menopang peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

5. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, menyangkut upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang diawali dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang dimiliki dalam rangka menyukseskan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2018) dengan memaksimalkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM dalam menjalankan perannya perlu didukung oleh semua pihak agar dapat meningkatkan kegiatan usahanya dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian, terutama dukungan dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan UMKM yang sering muncul di masa pandemi Covid 19, yaitu masalah akses UMKM ke pembiayaan yang masih rendah, juga masih rendahnya akses ke perizinan, terutama untuk membuka usaha dan meningkatkan mutu produk UMKM.

Pemerintah pusat telah meluncurkan banyak program pemberdayaan UMKM, seperti yang disampaikan oleh Tim

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2021), bahwa setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang telah berjalan cukup lama (*sustainable*) dengan nilai anggaran dan jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta menysasar kelompok rentan (miskin, perempuan), yaitu:

1. Program peningkatan kapasitas usaha, yang mencakup: (a) Inovasi Desa-Ekonomi Lokal, (b) Desa Wisata, (c) Sentra Kewirausahaan Pemuda, (d) Diversifikasi Usaha Nelayan, (e) Tenaga Kerja Mandiri, (f) Pemberdayaan Pelaku Usaha, (g) Pendidikan Wirausaha Unggulan, (h) Industri Rumahan, (i) UMKM Go Online, dan (j) Export Coaching.
2. Program pembiayaan, yang mencakup: (a) Kredit Usaha Rakyat, (b) Bantuan Wirausaha Pemula, (c) UMi, (d) PNM Mekaar, (e) PNM Ulaam, (f) Modal Usaha Kelautan, (g) Peningkatan Keluarga Sejahtera, dan (h) KUBE.
3. Ekosistem, mencakup: (a) Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT), (b) Pendaftaran Kekayaan Intelektual, dan Penyusunan Laporan Keuangan.

Mayoritas program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bersumber pada program pemberdayaan UMKM Pemerintah Pusat yang saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan untuk pelaku usaha mikro.

Penelitian ini mendapatkan beragam program dan bentuk pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi. Hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi menunjukkan beragam program dan bentuk pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Program dan Bentuk Pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi

No.	Nama Program	Bentuk Pemberdayaan
1	Pemulihan ekonomi (<i>economic recovery</i>)	Penelusuran UMKM
2	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Pembiayaan (pinjaman modal usaha) dan bantuan subsidi bunga
3	Pelatihan UMKM melalui sistem digital	Akses pasar (fasilitasi promosi, <i>e-commerce</i> , sistem distribusi)
4	Pelatihan kewirausahaan	Pelatihan
5	Pendampingan penyusunan laporan keuangan	Pelatihan SDM
6	Program standar-disasi mutu dan sertifikasi produk	Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi (ekspor, merk/kemasan, halal, SNI, dan lain-lain)
7	Program Peningkatan Kapasitas UMKM	Pendampingan UMKM
8	Pelatihan pemasaran <i>online</i> dan <i>offline</i>	Pelatihan
9	Promosi produk UMKM	Fasilitasi kerja sama dengan Grand SMESCO Jakarta, Yogya Department Store, dan Toserba Slamet
10	KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	Pinjaman modal dan pendampingan
11	Dana alokasi khusus non fisik	Fasilitasi
12	Fasilitasi perijinan	Fasilitasi perijinan usaha, PIRT, label halal, HAKI

Pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi memerlukan kebijakan pemerintah daerah melalui intervensi pada level sistem, level organisasi/kelembagaan, dan level individu/aparatur pemerintah daerah.

Pada level sistem, pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi difokuskan pada tiga hal. (1) Penguatan dan pengaturan program kerja pemerintah, seperti pengaturan tentang mekanisme perencanaan program kerja pemerintah Kota Sukabumi di bidang koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian. Fokusnya terletak pada perencanaan pengembangan UMKM melalui program peningkatan kapasitas UMKM dalam produksi, promosi, dan pemasaran berbasis digital. (2) Sistem manajemen dan pengelolaan keuangan diintervensi melalui peningkatan kemampuan UMKM dalam

pengelolaan keuangan, serta memfasilitasi UMKM dalam mengakses keuangan. (3) Sistem pengembangan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM UMKM melalui program pemberdayaan SDM UMKM.

Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada level organisasi/kelembagaan diintervensi melalui sinergitas SKPD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta kemampuan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi dalam memprogramkan dan melaksanakan program inovasi dalam bidang UMKM. Sementara itu, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada level individu/aparatur diintervensi melalui pendidikan formal dan pelatihan aparatur dan pelaku UMKM, seperti pelatihan peningkatan kemampuan individu pelaku UMKM, khususnya kemampuan dalam teknologi informasi berbasis digital yang dibutuhkan di masa pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di masa Pandemi Covid 19 secara umum sudah dilaksanakan mulai dari level sistem, level organisasi/kelembagaan, dan level individu SDM. Namun diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang UMKM untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah Kota Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilato, Rosman. (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintahan, dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Lokal*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2021). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.

Jurnal

- Amri, Andi. (2020). Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1): 123-130. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/605>.
- Hastuti, Sri. (2021). Penerapan *Cost Reduction Strategies* Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kota Bogor (Studi pada Anggota UMKM di Komunitas Kefir Bogor). *JURLAB Jurnal Lentera Bisnis*, 10(1): 78-102. <http://dx.doi.org/10.34127/jrlab.v10i1.394>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas hibah penelitian tahun anggaran 2021. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Djuanda Bogor yang telah memfasilitasi penelitian ini.